



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR

Jl. Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur 92981

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR

NOMOR : KEP - 4 /P.4.36/Dti/05/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
 - untuk mewujudkan maksud tersebut guna melaporkan pelaksanaan tugas maka dipandang perlu menunjuk pejabat pelaksana pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-004/A/J.A/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan sistem informasi publik nasional;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang satuan kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020;
 - Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 hal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);

MEMUTUSKAN :.....



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur atas nama :
- Nama : Vanny Ritasari, S.H.
Nip/Nrp : 19940812 202203 2 002 / 62294296
Pangkat/Gol : Ajun Jaksa Madya / III/a
Jabatan : Jaksa Fungsional Seksi Intelijen
No.WA : 082134484059
Email Satker : vannyritasari@kejaksaan.go.id
- KEDUA : Pejabat Pelaksana pada Kejaksaan Negeri melakukan pengisian aplikasi SIPPN dengan alamat website <https://sipp.menpan.go.id>;
- KETIGA : Pejabat Pelaksana diwajibkan bergabung dengan group telegram Reformasi Birokrasi untuk menerima panduan/informasi lebih lanjut;
- KEEMPAT : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 13 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR,



Dr. YADYN, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19800326 200312 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;
4. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;
6. Arsip.

